

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Bambang Waluyo. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta; Sinar Grafika.

Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik (Teori. Proses dan Studi Kasus)*. Jakarta: Buku Seru.

Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.

Friedman. M. L. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial terjemahan dari Buku Lawrance M. Friedman. The Legal System; Social Science Perspektif*. Bandung: Nusa Media.

International IDEA. 2002. International Electoral Standards. Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections. Stockholm; International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Inu Kencana Syafie. 2014. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung; Pustaka Reka Cipta Cet ke ii.

Ismail Sunny. 1987. *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Cet. vi. Jakarta; Aksara Baru.

Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwa et,al. 2006. *Hukum Administasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ridwan et,al. 2018. *Hukum Kepegawaian*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

Ridwan. HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta; Rajawali Pers.

Samodra Wibawa. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Samuel P. Huntington . 1997. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Jakarta; Gratifi.

Sastra Djatmika dan Morsono. 1995. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*.

Jakarta; Djambatan.

Satrio Wibowo. 2022. *Hukum Kepegawaian*. Tulungagung; Biru Atma Jaya.

Seri Demokrasi Elektoral Buku 15. *Penanganan Pelanggaran Pemilu*.

Sri Hartini et.al. 2018. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Jakarta; Sinar Grafika.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Cet. XII. Bandung; Penerbit Alfabeta.

Thoha Miftah. 2011. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta; Kencana Prenada Media Group.

SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Marzuki. 2007. *Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Utara*. Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Sekolah Pascajarna Universitas Sumatera Utara.

JURNAL

Arini Nur Annisa Et.al. 2022. *Government Supervision Of The Lights Fulfilment Of Housed Workers In The Transition Period*. Awing Long Law Review. Vol.5 No.1.

Damanik. F. F, Kalo. S, Putera. E, Nasution, M. 2018. *Perbuatan Mengaku Dirinya Sebagai Orang Lain Dalam Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Legislatif (Studi Kasus: Putusan Nomor:01/Pid.S/2014/P.N.Mdn Dan Putusan Nomor:02/Pid.B/2014/P.N.Mdn)*, USU Law Journal, Vol.6. No.4 Juli.

Eka Septiani. 2023. *Analisis Terhadap Upaya Penguatan Implementasi Kebijakan Netralitas ASN dalam Pemilu*. Jurnal Ebisma, Vol. III No. ! Juli.

Manoppo, R. S. F. 2021. *Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil DI Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Administrasi Publik.

Muhammad Khaisar Ajiprasetyo dan Bagus Sarnawa. 2020. *Fungsi Pengawasan Asas Netralitas Terhadap ASN di Daerah Istimewa*

Yogyakarta Oleh Badan Pengawas Pemilu DIY, Jurnal Media of Law and Sharia , Vol.1 No. 4.

Wayan Yoga Pratama dkk, 2022, *Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak* Jurnal Konstruksi Hukum,

Wayan Yoga Pratama dkk. 2022. *Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak*, Jurnal Konstruksi Hukum. Vol. III No. 2 April, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. bab VIIB. Pasal 22E.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal 280 ayat 2 huruf (f).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023.

Pasal 5 Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007.

Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat. Undang-Undang No. 15 Tahun 1969.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jakarta 06 Juni 2010.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara Pasal 3.

SUMBER INTERNET

Radio Republik Indonesia. Oleh Ika Fatmawati. 30 Januari 2024.

Modul Netralitas ASN. Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Darmawan. Ikhsan. 2015. Mengenal Ilmu Politik. Jakarta: Kompas.

Ari Welianto. "Sistem Demokrasi di Indonesia". Kompas. 11 Desember 2019.